

Laporan Kegiatan Initiative
”Bagaimana Upah Minimum dapat Membangun Ketahanan Pangan Indonesia?”

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Kamis, 19 Februari 2026
Narasumber	1. Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute) 2. Jonathan Farez Satyadharma (Peneliti Kualitatif, SMERU Research Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Kamis, 19 Februari 2026 The Indonesian Institute mengadakan diskusi Initiative! Secara online yang mengangkat tema “Bagaimana Upah Minimum dapat Membangun Ketahanan Pangan Indonesia?”. Forum ini dibuka dengan penekanan bahwa kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan paling fundamental dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Ia dirancang untuk menjamin standar hidup layak bagi pekerja. Namun demikian, pertanyaan yang menjadi fokus diskusi adalah apakah kenaikan upah minimum benar-benar mampu meningkatkan akses dan ketahanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Sebagai pembicara utama, Jonathan Farez Satyadharma, Peneliti Kuantitatif dari The Smeru Research Institute, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan konsep multidimensional yang tidak mudah dikuantifikasi secara tunggal. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga akses, keterjangkauan, stabilitas pasokan, serta kualitas konsumsi. Untuk memahami kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia, ia merujuk pada data yang dihimpun oleh Badan Pangan Nasional, serta data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Data Susenas, menurutnya, memiliki keunggulan karena mampu mengklasifikasikan tingkat kerawanan pangan rumah tangga, mulai dari kategori sedang hingga berat, sehingga memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kelompok yang paling terdampak.

Dalam paparannya, Jonathan menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tertinggi secara nominal terjadi di wilayah sekitar Jakarta, sejalan dengan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi

dan biaya hidup di kawasan tersebut. Secara umum, kenaikan upah minimum di Pulau Jawa berada dalam kisaran rata-rata 3–10 persen. Namun, ketika data kenaikan upah tersebut dibandingkan dengan indikator ketahanan pangan, hasilnya tidak menunjukkan korelasi yang kuat. Artinya, kenaikan upah minimum belum secara signifikan berasosiasi dengan peningkatan akses atau ketahanan pangan pada kelompok rentan.

Menariknya, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya tren peningkatan alokasi belanja nonpangan di kalangan masyarakat setelah kenaikan upah minimum. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor inflasi, khususnya inflasi pangan, yang turut memengaruhi harga bahan makanan. Kenaikan harga pangan dapat menggerus tambahan pendapatan yang diperoleh dari kenaikan upah, sehingga rumah tangga tidak serta-merta meningkatkan konsumsi pangan. Dalam konteks ini, daya beli pangan menjadi isu yang lebih kompleks daripada sekadar nominal upah.

Jonathan menekankan bahwa untuk memahami dinamika ini secara lebih komprehensif, diperlukan studi yang lebih spesifik dan mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang memengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga. Misalnya, bagaimana elastisitas permintaan terhadap barang pangan dibandingkan dengan barang nonpangan, serta bagaimana preferensi konsumsi berubah ketika pendapatan meningkat. Ia juga mengingatkan bahwa ketika rumah tangga merasa lebih “berkecukupan”, terdapat kecenderungan untuk mengalokasikan tambahan pendapatan pada barang-barang yang bersifat elastis atau investasi jangka panjang, seperti perumahan, pendidikan, maupun kebutuhan nonpangan lainnya.

Selain tantangan struktural tersebut, persoalan implementasi kebijakan juga menjadi sorotan. Masih terdapat minimnya kepatuhan sebagian institusi atau perusahaan dalam membayarkan upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Ketidakpatuhan ini tentu mengurangi efektivitas kebijakan sebagai instrumen perlindungan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, persoalan upah minimum tidak hanya berhenti pada angka yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga pada aspek pengawasan dan penegakan regulasi.

Selain paparan Jonathan, Putu juga memberikan tanggapan dengan menyoroti aspek perilaku konsumsi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tingginya intensi belanja nonpangan dibandingkan

belanja pangan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor inflasi atau kenaikan harga bahan pokok, tetapi juga oleh pola konsumsi yang cenderung konsumtif. Dalam beberapa kasus, rumah tangga tetap meningkatkan pengeluaran untuk barang-barang nonpangan—yang kerap dikaitkan dengan simbol status sosial—meskipun kondisi keuangan mereka sebenarnya belum cukup kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan, termasuk dari kenaikan upah minimum, tidak otomatis diterjemahkan sebagai peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Lebih jauh, Putu menekankan bahwa kebijakan upah minimum perlu dilihat dalam kerangka kebijakan kesejahteraan yang lebih luas. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bahwa pelaksanaan program-program prioritas tidak mengesampingkan pembangunan sektor lain yang juga krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Instrumen seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, akses pendidikan yang berkualitas, serta formalisasi dan perlindungan bagi pekerja informal tetap menjadi elemen penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor, kenaikan upah minimum berisiko berdampak terbatas dalam mendorong ketahanan pangan maupun kesejahteraan jangka panjang.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum bukanlah solusi tunggal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut perlu dikombinasikan dengan intervensi lain, seperti pengendalian inflasi pangan, stabilisasi harga bahan pokok, penguatan jaring pengaman sosial, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Ketahanan pangan merupakan hasil dari interaksi berbagai kebijakan ekonomi dan sosial, sehingga pendekatannya pun harus komprehensif dan lintas sektor. Melalui forum ini, Initiative! menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data dan analisis yang tajam agar upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dapat benar-benar berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses pangan yang layak dan berkelanjutan.